

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Sistematika Penelitian Hukum	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	14
1. Dasar Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	14
2. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	17
1. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	18
B. Tinjauan tentang Penyadapan	20
1. Pengertian Penyadapan	20
2. Tujuan Penyadapan	22
C. Tinjauan tentang Pengaturan Penyadapan (<i>Wiretapping</i>)	22
1. Pengaturan Penyadapan (<i>Wiretapping</i>) menurut UUD 1945	22
2. Pengaturan Penyadapan (<i>Wiretapping</i>) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	25
3. Pengaturan Penyadapan (<i>Wiretapping</i>) menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

4. Pengaturan Penyadapan (<i>Wiretapping</i>) menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	27
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Jenis dan Sumber Data	33
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
D. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sinkronisasi Vertikal Legalitas Penyadapan (<i>wiretapping</i>) Oleh Jaksa Penyidik Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, KUHAP, UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK	37
1. Sinkronisasi antara KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar 1945	37
2. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.....	42
3. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap Undang-Undang Dasar 1945	47
B. Sinkronisasi Horizontal Legalitas Penyadapan Oleh Jaksa Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Antara KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK	51
1. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap KUHAP	51
2. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terhadap KUHAP	53

3. Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK	57
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA